



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TW II
DINAS PERHUBUNGAN

2025

KABUPATEN LUWU TIMUR

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena Anugerah dan Pertolongan-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Triwulan 2 Tahun 2025 dapat diselesaikan penyusunannya.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka setiap berakhirnya tahun anggaran diwajibkan setiap SKPD untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Indikator Kinerja. Laporan ini bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas seseorang atau pemimpin SKPD kepada atasannya, untuk mengetahui akuntabilitas instansi baik dari segi kinerja maupun keuangan dan merupakan laporan pertanggungjawaban SKPD terhadap tugas – tugas yang diembankan kepadanya. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mungkin masih terdapat kekurangan – kekurangan yang perlu dilakukan perbaikan sehingga laporan ini akan menjadi sempurna, oleh karena itu diharapkan saran dan masukan yang membangun dari semua pihak.

Demikianlah laporan ini dibuat, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

 **Malili, 14 Juli 2025**
KEPALA DINAS,
A.R. SALIM, S.Sos, MM
NIP. 196511051987031015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Instansi	Hal 1
2. Bidang Kewenangan	Hal 1
3. Tugas Pokok dan Fungsi	Hal 2
4. Struktur Organisasi	Hal 3

BAB II Perencanaan Kinerja

1. Visi dan Misi	Hal 7
2. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembngunan.....	Hal 8
3. Rencana Kinerja PD	Hal 11

BAB III Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja	Hal 15
2. Realisasi Anggaran	Hal 51

BAB IV Penutup..... Hal 58

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Instansi

Proses penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (good governance) merupakan komitmen pelaksanaan pemerintah dengan menjadikan akuntabilitas publik sebagai landasan. Komitmen ini harus didukung oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah yang secara konsisten menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang lebih bermutu, profesional dan akuntabel. Sistem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. Kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah bersih dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan 2, laporan ini merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui Laporan ini diharapkan dapat mempresentasikan penyelarasan nilai-nilai dasar yang membentuk budaya kerja ASN yang profesional, melalui core **Values ASN BerAKHLAK**, yaitu :

- **Berorientasi Pelayanan:** Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- **Akuntabel:** Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi.
- **Kompeten:** Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- **Harmonis:** Saling peduli dan menghargai perbedaan, menghargai setiap orang, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- **Loyal:** Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, memegang teguh ideologi Pancasila, setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah.
- **Adaptif:** Terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan, cepat menyesuaikan diri, dan bertindak proaktif.

Kolaboratif: Membangun kerjasama yang sinergis, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, dan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.

Laporan Akuntabilitas ini juga merupakan implementasi dari salah satu core **Values ASN BerAKHLAK** yaitu Akuntabel dimana Dalam konteks ASN Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya.

Aspek – Aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja.

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan telah menyusun perencanaan strategik yang termasuk di dalamnya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan dan kegiatan yang realistis untuk mendukung akuntabilitas instansi pemerintah, maka perencanaan strategis yang merupakan awal dalam mengevaluasi kinerja dinas untuk mempertanggungjawabkan perkembangan pembangunan di bidang perhubungan.

2. Bidang dan Kewenangan

Bidang dan kewenangan Dinas Perhubungan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- 1) Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah;
- 2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

3. Tugas Pokok dan Fungsi

3.1 Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Perhubungan adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

3.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

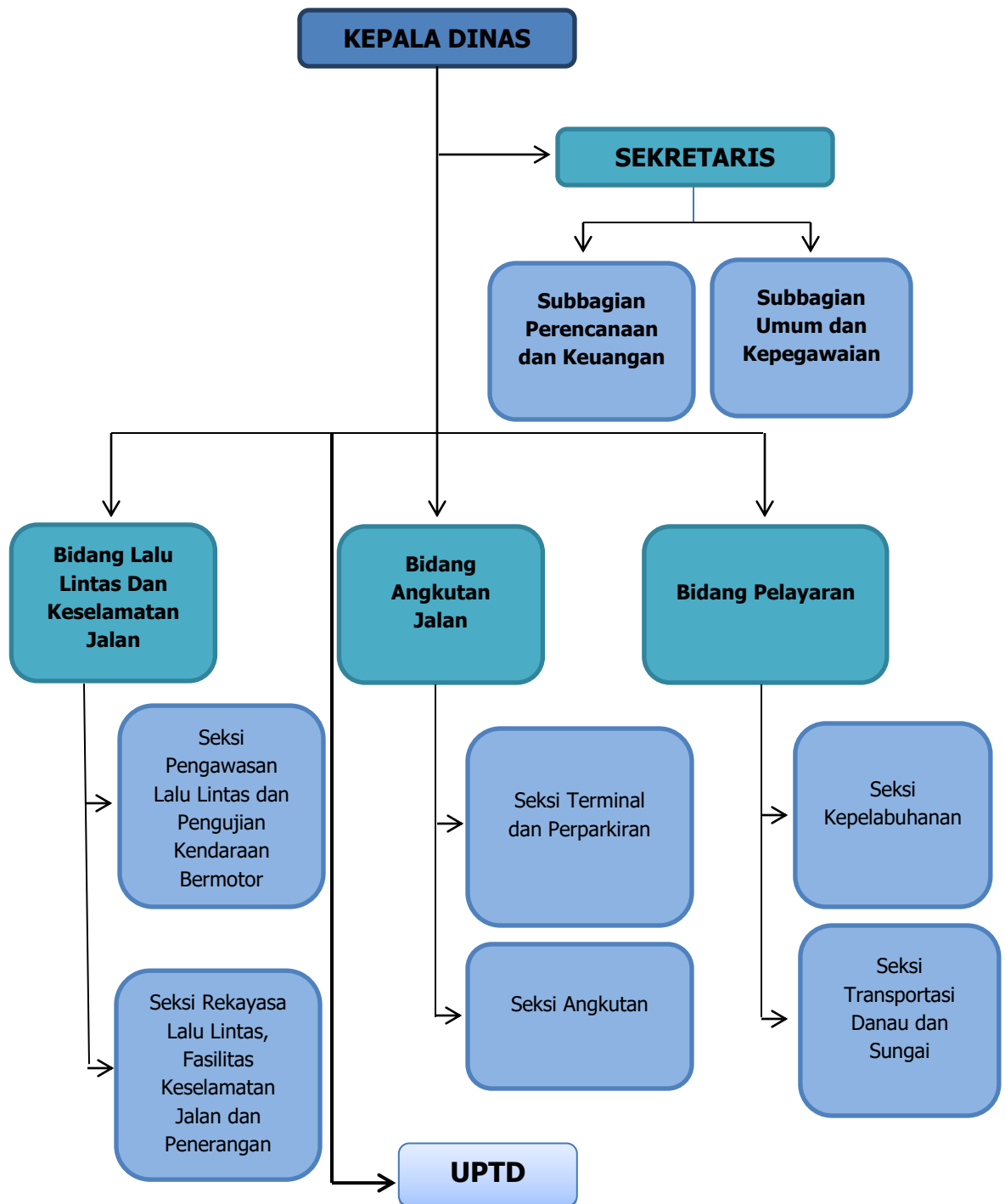
- a. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan;
- b. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Angkutan Jalan;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pelayaran;
- d. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- e. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya..

4. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan maka susunan organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

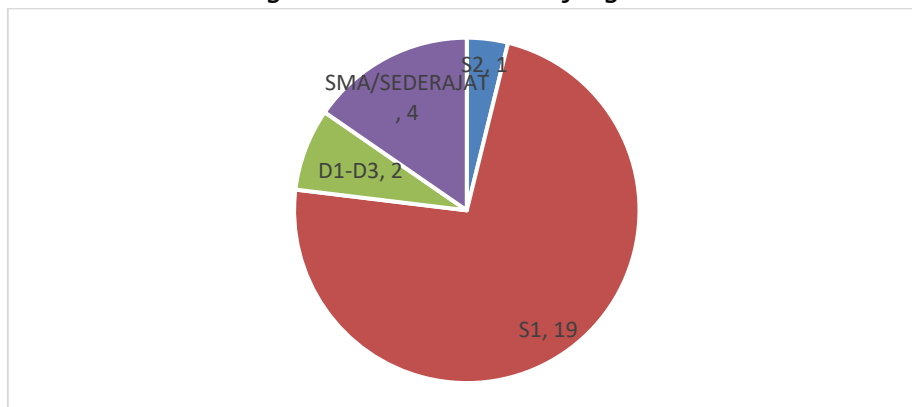
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Lalu Lintas Dan Keselamatan Jalan, terdiri atas :
Seksi Pengawasan Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan Bermotor ; dan
Seksi Rekayasa Lalu Lintas, Fasilitas Keselamatan Jalan dan
Penerangan Jalan Umum.
4. Bidang Angkutan Jalan, terdiri atas :
Seksi Terminal dan Perparkiran;
Seksi Angkutan.
5. Bidang Pelayaran, terdiri atas :
Seksi Kepelabuhanan; dan
Seksi Transportasi Danau dan Sungai.
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



Dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sesuai dengan susunan organisasi diatas, Dinas Perhubungan memiliki pegawai berjumlah 84 orang, terdiri dari 27 PNS dan 63 upah jasa. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat, golongan dan jabatan dapat lihat pada table sebagai berikut :

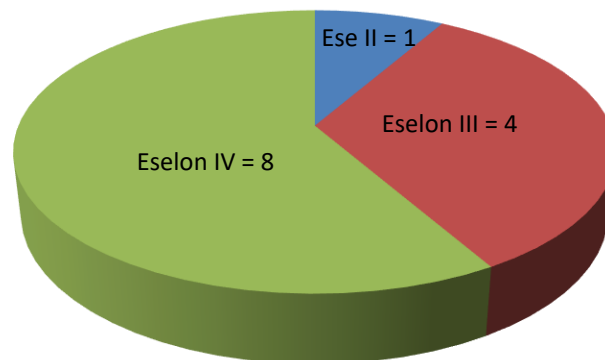
Gambar 1.2
Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Tabel 1.1
Data Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (org)
1	Pembina Utama Muda, IV/c	1
2	Pembina Tk. 1, IV/b	1
3	Pembina, IV/a	3
4	Penata Tk.I, III/d	6
5	Penata, III/c	5
6	Penata Muda Tk.I, III/b	4
7	Penata Muda, III/a	2
8	Pengatur, II/d	2
9	Pengatur Muda Tk.I, II/c	2
9	Pengatur Muda, II/b	1

Gambar 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Eselon



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

1. VISI DAN MISI

1.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Dinas Perhubungan haruslah juga mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Periode 2021 – 2026 yaitu :

**"Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju
Berlandas Nilai Agama dan Budaya"**

1.2 Misi

Misi merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan agar apa yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Misi Dinas Perhubungan dinyatakan sebagai suatu tugas untuk meningkatkan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Dengan pemahaman akan misi, maka dapat diharapkan unsur dalam sistem transportasi mampu berinteraksi untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Adapun misi Dinas Perhubungan mengacu pada 2 misi yaitu:

- Misi 3 {
 - Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
- Misi 4 {
 - Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

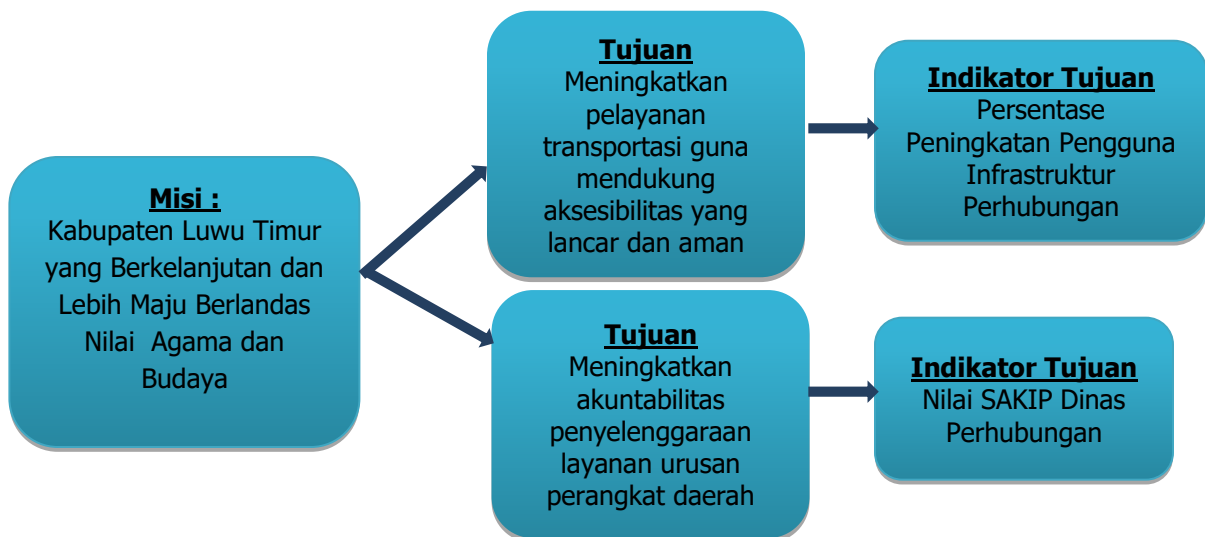
2. TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu. Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat mewujudkan sesuatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang yang dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif dan diupayakan terfokus pada kostumer. Tujuan memiliki 3 karekteristik yaitu idialistik, jangkauan ke depan dan abstrak. Berdasarkan hal tersebut Dinas Perhubungan menetapkan tujuannya sebagai berikut :

Gambar 2.1

Tujuan RENSTRA Dishub 2021 – 2026



2.2 Sasaran

Tujuan tersebut diatas diharapkan dapat mencapai beberapa sasaran organisasi. Sasaran organisasi ditetapkan dengan menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaian dapat diukur dengan jelas. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat, terinci, dapat diukur dan

dicapai. Berdasarkan hal tersebut Dinas Perhubungan menetapkan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SAT	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
TUJUAN 1: Meningkatkan Pelayanan Transportasi Guna Mendukung Aksesibilitas Yang Lancar Dan Aman								
SASARAN 1: Meningkatnya Kualitas Konektivitas Transportasi								
Rasio Konektivitas Kabupaten	(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	Rasio	0.30	0.58	0.63	0.67	0.72	0.77
SASARAN 2: Meningkatkan keselamatan dan Keamanan Transportasi								
Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	((Jumlah angkutan umum yang memiliki izin laik operasi) / (Jumlah angkutan umum yang seharusnya memiliki izin laik beroperasi)) x 100%)	%	76.35	77.87	79.35	80.76	82.03	83.32
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	Jumlah kejadian kecelakaan angkutan tidak laik jalan tahun n/ jumlah kejadian kecelakaan angkutan wajib uji tahun n	Rasio	0,00	0,00	0,00	0,27	0,20	0,13
TUJUAN 2: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Dinas Perhubungan								
SASARAN 2: Menigkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Perhubungan								
Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Opini yang dikeluarkan oleh Inspektorat terhadap laporan SAKIP tahun-n	Nilai	66,22	70,35	73,24	75,26	80,25	82,55

2.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam RENSTRA diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Adapun Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur akan ditempuh dengan menetapkan kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang di tetapkan oleh pihak yang berwenang untuk di jadikan pedoman bagi setiap organisasi, agar adanya keterpaduan dan upaya untuk mencapai Visi dan Misi.

Adapun Strategi dan Kebijakan yang di tetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur adalah :

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan SKPD

Visi : Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya			
Misi : Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan transportasi guna mendukung aksesibilitas yang lancar dan aman	Meningkatnya Kualitas Konektivitas Transportasi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana transportasi yang menunjang kelancaran arus transportasi	Penyediaan prasarana transportasi yang menunjang kelancaran arus transportasi dan keselamatan berlalu lintas
			Pemeliharaan prasarana transportasi yang mendukung kontinuitas pelayanan
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan angkutan menuju fasilitas publik seperti sekolah, pasar dan objek wisata yang mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah	Penyediaan dan pemeliharaan sarana angkutan yang aman dan nyaman guna membantu masyarakat mengakses fasilitas publik
	Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna mendapatkan bantuan sarana transportasi		
	Meningkatnya keselamatan dan Keamanan Transportasi	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan sehingga menciptakan ketertiban dan keselamatan pengoperasian angkutan umum	Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan (kepolisian, BPTD)
			Peningkatan edukasi / sosialisasi keselamatan angkutan kepada masyarakat
Pengembangan layanan pengujian kendaraan bermotor yang berbasis IT			

Misi : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)			
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan guna tercapainya target kinerja dan keuangan serta melaporkannya dengan tertib	Merencanakan dan melaksanakan program / kegiatan secara konsisten mengacu kepada dokumen perencanaan jangka menengah dinas (RENSTRA), dengan harapan seluruh target Bupati – Wakil Bupati yang dibebankan kepada Dinas Perhubungan dapat dicapai dalam kurun 5 tahun;
			Mendorong pegawai yang diberi tanggungjawab kegiatan agar melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan petunjuk dan membuat laporan pertanggungjawaban secara benar dan tepat waktu
			Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan program / kegiatan. Jika terdapat permasalahan, hal – hal yang menyimpang, deviasi capaian target, agar segera dilakukan perbaikan dan revisi target

3. RENCANA KINERJA SKPD

Seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan hanya dapat dicapai apabila telah disusun, ditetapkan dan dilaksanakannya strategi yang tepat. Strategi yang dibangun ini dilandasi informasi dan data yang relevan dari analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Penjabaran strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pokok

3.1 Program

Pada tahun anggaran 2025, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur telah menyusun 2 Program Urusan Perhubungan dan 1 Program Urusan Penunjang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran dinas, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program Urusan Perhubungan Tahun 2025

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SAT	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)									
Tersedianya sarana dan prasarana LLAJ yang berdaya guna dan berhasil guna	Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan (%)	(Jumlah sarana dan prasarana LLAJ yang terbangun/jumlah sarana dan prasarana LLAJ yg seharusnya ada)*80%+(Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang/jumlah rambu lalu lintas yang seharusnya ada)*20%	%	45,08%	52,46%	67,37%	79,90%	90,93%	100,00%
Terciptanya lalu lintas angkutan jalan yang aman dan nyaman	Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan (%)	Rencana Kendaraan yang lolos uji (laik jalan)/Rencana Jumlah Kendaraan wajib uji	%	94,07%	94,24%	94,41%	94,57%	94,73%	94,88%
	Persentase Kejadian Kecelakaan angkutan wajib uji (%)	(Jumlah kejadian kecelakaan angkutan wajib uji yang tidak laik jalan tahun n/jumlah kejadian kecelakaan angkutan wajib uji tahun n)*100%	%	0	0	0	0,27	0,20	0,13
Program Pengelolaan Pelayaran									
Terciptanya pelayaran kapal yang aman dan nyaman	Persentase Kapal yang laik berlayar di laut (%)	Jumlah kapal yang beralamat Kabupaten Luwu Timur yang memiliki izin layar /jumlah kapal yang berlayar yang beralamat Kabupaten Luwu Timur	%	22,17%	27,17%	31,98%	36,57%	40,86%	45,18%

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SAT	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Persentase Kapal yang laik berlayar di danau (%)	Jumlah kapal yang beroperasi di danau yang memiliki izin/jumlah kapal yang beroperasi di danau	%	12,50%	25,00%	43,75%	68,75%	87,50%	100,00%
Program Pengelolaan Penerbangan									
Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan bandara	Jumlah penumpang angkutan udara (orang)	Jumlah penumpang angkutan udara tahun-n	orang	6137	-	-	-	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah capaian Kinerja Kegiatan/Jumlah Kegiatan	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

3.2 Perencanaan Kinerja

Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan telah menetapkan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja ini ditetapkan menjadi perjanjian kinerja yang merupakan perwujudan komitmen antara Bupati selaku pemberi amanah kepada Kepala SKPD selaku penerima amanah. Dalam setiap perjanjian kinerja yang dibuat, telah ditetapkan indikator yang terukur. Salah satu tujuan dari perjanjian kinerja ini adalah sebagai tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja SKPD.

Adapun perjanjian kinerja tahun 2025 yang dibuat Kepala Dinas Perhubungan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perhubungan

No.	Indikator kinerja	Sat	Target 2025	Target TW 2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	0,72	0,67
2	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	%	82,44%	41,86%
	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	Rasio	0,20	0,20
3	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	%	79,85	79,85

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pelaporan berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LAKIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Triwulan 2 Tahun 2025.

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah masyarakat di bidang perhubungan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan. Laporan akuntabilitas kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja pada tahun berjalan. Laporan Kinerja triwulan 2 ini memberikan gambaran capaian kinerja tahun berjalan dan target per triwulan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tren capaian tiap – tiap program setiap triwulan. Sehingga akan didapatkan data program – program yang capaiannya telah mendekati target maupun yang belum mendekati target. Setiap capaian kinerja akan dilakukan analisis keberhasilan atau kegagalan dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Dari 3 Sasaran Strategis ditetapkan 4 Indikator Kinerja sasaran sebagai ukuran keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025, Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rasio Konektivitas Kabupaten
2. Persentase angkutan umum yang laik beroperasi

3. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi
4. Nilai SAKIP Dinas Perhubungan

Tabel A
Hasil Pengukuran Kinerja dari Perjanjian Kinerja Dinas
Perhubungan Tahun 2025 Triwulan 2

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

No.	Indikator kinerja	Sat	Target 2025	Target TW 2	Realisasi TW 2	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	0,72	0,67	0,67	100,00%
2	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	%	82,44%	41,86%	4,57%	20,96%
	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	Rasio	0,20	0,20	0,068	166,00%
3	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	%	79,85	79,85	81,50	102,07%

I. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Infrastruktur transportasi

Indikator : Rasio Konektivitas Kabupaten

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan 2021 – 2026 Dinas Perhubungan yang mana telah dilakukan beberapa kali penyesuaian, memiliki sasaran Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dengan Indikator Kinerja tujuan adalah Rasio Konektivitas. Rasio Konektivitas merupakan persentase wilayah Kabupaten Luwu Timur yang sudah terlayani oleh moda transportasi baik darat dan laut. Berikut merupakan formulasinya

Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020

Rasio konektivitas kabupaten $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$

- IK1 (angkutan jalan) = $(\text{Jumlah trayek yang dilayani pd kabupaten/kota} \times \text{bobot trayek}) \div \text{jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut}$
- IK2 (Angkutan sungai, danau dan penyeberangan) = $\text{jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd Kabupaten/Kota tsb} \times \text{bobot lintas} \div \text{jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota tersebut}$

Keterangan :

IK1 (Angkutan Jalan)

- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP
- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu

IK2 (Angkutan sungai, danau, penyeberangan)

- Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil
- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antara wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu

Bobot angkutan jalan atau sungai, danau dan penyeberangan

1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)
2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan jalan = 50)
3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)
4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)

Bobot Trayek atau Lintas :

- a. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi tinggi ($>5x$ dalam seminggu), bobot = 1
- b. Bobot trayek lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), = 0.8
- c. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), bobot = 0.5

1) IK 1 (Angkutan Jalan)

= $\frac{\text{Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten} \times \text{bobot trayek}}{\text{Jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut}}$

= $\frac{8 \times 1}{15}$

= 0,53

2) IK 2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)

= $\frac{\text{jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten} \times \text{bobot lintas}}{\text{jumlah kebutuhan Intas penyeberangan pada kabupaten}}$

= $\frac{8 \times 1}{8}$

= 1

**Rasio konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) +
(IK2 x Bobot angkutan sungai, danau
dan penyeberangan)**

Note: Bobot angkutan jalan = 70 dan Bobot untuk ASDP = 30

(sesuai dengan Permendagri 18 Tahun 2020)

$$= (0,53 \times 70\%) + (1 \times 30\%)$$

$$= 0,37 + 0,3$$

$$= 0,67$$

Rasio Konektivitas 0,67 artinya sebanyak 0,67 atau 67% wilayah sudah terlayani oleh moda Transportasi baik darat dan penyeberangan.

Nilai terget sebesar 0,67 merupakan capaian tahun sebelumnya, karena pada triwulan 2 Tahun 2025 belum ada peningkatan dimana ditargetkan penambahan 1 trayek namun belum ada realisasi

Tabel 3.1
Capaian Sasaran 1 Indikator 1 Triwun 2 Tahun 2025

Indikator	Formula	Target 2025	Target TW 2	Realisasi TW 2	Capaian
Rasio Konektivitas Wilayah	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) $= (0,333 \times 70\%) + (1 \times 30\%)$	0,67	0,63	0,63	100 %
	IK1	0,6	0,53	0,53	
	Bobot angkutan jalan	70%	70%	70%	
	IK2	1	1	1	
	Bobot bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan	30%	30%	30%	
	IK1 (angkutan jalan)	Jumlah trayek yang dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi (jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)	0,6	0,53	0,53
		Jumlah trayek yang dilayani	9	8	8
		Bobot trayek	1	1	1
		Jumlah Kebutuhan trayek	15	15	15

Indikator	Formula		Target 2025	Target TW 2	Realisasi TW 2	Capaian
IK 2 (Angkutan sungai, danau, penyebrangan)	jumlah lintas penyebrangan yang beroperasi pd Kabupaten/Kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyebrangan pada Kabupaten/Kota tersebut)		1	1	1	
	Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi		8	8	8	
	bobot lintas		1	1	1	
	Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan		8	8	8	

Tabel 3.1
Capaian Sasaran 1 Indikator 1 Tahun 2025

TRAYEK ANGKUTAN DARAT

No	Nama Trayek	Rencana Rute	Realisasi Rute	Ke t
1	Trayek 1 (AKAP)	Malili - Sulawesi Tenggara		
2	Trayek 2 (AKAP)	Malili - Sulawesi Tengah	Malili - Sulawesi Tengah	
3	Trayek 3 (AKDP)	Sorowako - Malili - Makassar	Sorowako - Malili - Makassar	
4	Trayek 4 (ANDES)	Malili - Tomoni		
5	Trayek 5 (ANDES)	Malili - Burau		
6	Trayek 6 (ANDES)	Malili - Mangkutana		
7	Trayek 7 (ANDES)	Malili - Sorowako	Malili- Wasuponda-Soroako	
8	Trayek 8 (ANDES)	Malili - Wawondula	Malili-Wasuponda-Wawondula-Timampu	
9	Trayek 9 (ANDES)	Malili - Wotu		
10	Trayek 10 (ANDES)	Malili - Wasuponda	Malili-Wasuponda-Wawondula-Timampu	

No	Nama Trayek	Rencana Rute	Realisasi Rute	Ket
11	Trayek 11 (ANDES)	Tomoni - Kalaena		
12	Trayek 12 (ANDES)	Tomoni - Wotu		
13	Trayek 13 (ANDES)	Wasuponda - Sorowako	Wasuponda - Sorowako	
14	Trayek 14 (ANDES)	Wasuponda - Wawondula	Wasuponda - Wawondula	
15	Trayek 15 (ANDES)	Wawondula - Sorowako	Wawondula - Sorowako	

LINTAS PENYEBERANGAN

No	Nama Trayek	Rute	Ket
1	Trayek 1	Pelabuhan Timampu-Pelabuhan Loeha	Trayek Kapal Tradisional
2	Trayek 2	Pelabuhan Timampu-Pelabuhan Bantilang	Trayek Kapal Tradisional
3	Trayek 3	Pelabuhan Timampu-Pelabuhan Batu Mata'a (Desa Tokalimbo)	Trayek Kapal Tradisional
4	Trayek 4	Pelabuhan Timampu-Pelabuhan Beau (Desa Tokalimbo)	Trayek Kapal Fery & Trayek Kapal Tradisional
5	Trayek 5	Pelabuhan Timampu-Pelabuhan Lengkobale	Trayek Kapal Tradisional
6	Trayek 6	Pelabuhan Soroako-Pelabuhan Nuha	Trayek Kapal Fery & Trayek Kapal Tradisional
7	Trayek 7	Pelabuhan Soroako-Pelabuhan Matano	Trayek Kapal Tradisional
8	Trayek 8	Pelabuhan Matano-Pelabuhan Nuha	Trayek Kapal Tradisional

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3.2

Realisasi Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Target Tw 2	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4		5	6
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	0,72	0,67	0,67	100,00%

Rasio Konektivitas Kabupaten dengan pada triwulan 2 Tahun 2025 di target sebesar 0,67 karena pada triwulan 2 masih dalam tahap perencanaan atau persiapan penambahan trayek baru, sehingga realisasi juga 0,67 sama seperti realisasi pada tahun 2024.

Rasio Konektivitas 0,67 artinya sebanyak 0,67 atau 67% wilayah sudah terlayani oleh moda Transportasi baik darat dan penyeberangan. Semakin tinggi rasio konektivitas angkutan jalan, semakin baik aksesibilitas yang dimiliki oleh masyarakat ke berbagai destinasi seperti pusat kota, pusat perdagangan, dan wilayah lainnya.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 Dengan Tahun 2024, dan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Thn 2023		Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Thn 2024 (%)	Capaian Kinerja Thn 2025		Capaian Kinerja Thn 2025 (%)
		Target TW 2	Real TW 2		Target TW 2	Real TW 2		Target TW 2	Real TW 2	
1	2	9	6	8	9	9	8	9	10	11
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	0,4	0,4	100%	0,63	0,63	100%	0,67	0,67	100%

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten Triwulan 2 Tahun 2025 Dengan Tahun 2024, dan

Tahun 2023 menggambarkan bahwa setiap tahunnya target meningkat dan realisasinya sesuai dengan target sehingga capaian kinerja setiap tahun sebesar 100%

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.4

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 Dengan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024		Capaian Kinerja Thn 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Thn 2025(%)
		Target TW 2	Real		Target TW 2	Real TW 2	
1	2	9	6	8	9	10	11
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	0,63	0,63	100%	0,67	0,67	100%

Untuk capaian kinerja triwulan 2 tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar 100% yang berarti tidak ada perbedaan capaian Rasio Konektivitas Kabupaten

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 Dengan target Jangka Menengah

Tabel 3.5

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Sat	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Target Sampai 2023	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	%	0,77	0,67	87,01%

Perbandingan realisasi triwulan 2 Tahun 2025 dengan Target jangka menengah Tahun 2021 -2026 adalah sebesar 87,01% jika melihat trend yang ada maka Dinas Perhubungan optimis akan mencapai target renstra tersebut.

E. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Tabel 3.6

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja Utama	Sat	Realisasi Target Nasional 2025	Realisasi Target Kabupaten TW 2	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Rasio konektivitas Kabupaten	Rasio	0,82	0,67	81,70%

Target Rasio konektivitas Kabupaten untuk wilayah Kabupaten Luwu Timur sebesar 0,67 sedangkan untuk Rasio Konektivitas Dan Aksesibilitas Nasional sebesar 0, 82 dimana capaian Kab. Luwu Timur sebesar 81,70 %

Sumber Data terkait tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran Kementerian Perhubungan diperoleh dari Peraturan Menteri Perhubungan No PM 80 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024, sedangkan untuk data target dan realisasi Kementerian Perhubungan diperoleh dari website http://eperformance.dephub.go.id/index.php/public/capaian_kementerian

F. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.7

Realisasi Sasaran 1 Indikator 1

No	Indikator Kinerja Utama Sasaran 1	Capaian %
1	2	6
1	Rasio konektivitas Kabupaten	100%

1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja

Penyebab keberhasilan capaian Angkutan umum yang laik beroperasi adalah :

➤ Pembangunan Terminal

Dengan terbangunnya Terminal Malili dan Terminal Tarengge maka diharapkan Segala aktivitas mengatur kedatangan dan

keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan dapat berjalan maksimal, sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas terminal dan tidak ada lagi aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang yang dilakukan di luar Terminal.

- Pengoperasian dan pemeliharaan Bus Sekolah
Dengan adanya 28 unit bus sekolah yang melayani 11 kecamatan di Kabupaten Luwu Timur maka akses anak sekolah untuk pergi dan pulang sekolah lebih mudah dan aman dan adanya rencana penambahan 3 unit bus sekolah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap anak sekolah
- Rekomendasi izin trayek
Dengan adanya rekomendasi izin trayek maka angkutan umum dapat mengurus pembuatan atau perpanjangan izin trayek sehingga semua angkutan umum penumpang yang beroperasi di Kabupaten Luwu timur memiliki trayek tetap
- Pengawasan terhadap trayek yang dilayani
Kegiatan ini dilakukan guna mengetahui seberapa jauh tingkat perkembangan pelayanan angkutan, serta untuk mengetahui faktor penyebab atau hal – hal yang dapat mengganggu pelaksanaan angkutan sehingga dapat diambil langkah – langkah pemecahan masalah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
Dengan beroperasi dan terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau maka akses pengguna fasilitas pelabuhan akan lebih mudah dan aman
- Penetapan Trayek Penyeberangan

2. Analisis Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja

Penyebab kegagalan capaian indikator 1 yaitu :

- Pembangunan Terminal Malili dan Terminal Tarengge yang dilaksanakan secara bertahap, sehingga aktivitas yang dilaksanakan di Terminal tersebut belum maksimal.
- Terminal Tarengge saat ini berstatus sebagai Terminal Penumpang Tipe C, sehingga secara regulasi hanya diperuntukkan bagi pelayanan angkutan dalam kabupaten/kota dan angkutan pedesaan. Berdasarkan ketentuan penyelenggaraan terminal penumpang, Terminal Tipe C tidak memiliki kewenangan untuk mengakomodir maupun melayani Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Keterbatasan kewenangan tersebut berdampak

pada tidak optimalnya pemanfaatan fasilitas terminal serta rendahnya volume kendaraan yang beroperasi melalui terminal.

- Angkutan umum yang tidak memperpanjang maupun mengurus izin trayek, dimana hal itu mempengaruhi kepada variabel perhitungan rasio konektivitas karena syarat angkutan umum dapat beroperasi adalah berbadan hukum atau badan usaha.
- Maraknya kendaraan plat gantung beroperasi lainnya kendaraan umum yang sah

3. *Alternative Solusi Yang Harus Dilakukan*

Alternative solusi untuk permasalahan pada Sasaran 1 dengan yaitu :

- Berkolaborasi dengan Polres Luwu Timur melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum yang tidak memperpanjang izin trayeknya, untuk bersama-sama mengatur kelangsungan pengusaha angkutan umum agar tercipta pelayanan transportasi yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu.
- Memberikan teguran langsung kepada pemilik kendaraan yang tidak memiliki izin trayek namun melakukan aktivitas layaknya angkutan penumpang umum, sehingga hal ini merugikan angkutan penumpang umum lainnya, karena akan mempengaruhi jumlah penumpang yang diangkut serta pendapatan pemilik kendaraan.

G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut alokasi anggaran serta anggaran perubahan dari sub kegiatan terkait pengawasan angkutan perintis yang menjadi kinerja Rasio konektivitas Kabupaten

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 1

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN II (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 31 JUNI 2025	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	6,150,174,033	983,014,033	265,624,032.53	27.02%
	Pembangunan Gedung Terminal	5,423,120,477	574,700,477	44,700,477.00	7.78%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	727,053,556	408,313,556	220,923,555.53	54.11%
2	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	10,009,200	8,329,200	3,920,000.00	47.06%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN II (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 31 JUNI 2025	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	10,009,200	8,329,200	3,920,000.00	47.06%
3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6,762,161,500	5,473,118,550	1,057,555,322.00	19.32%
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6,762,161,500	5,473,118,550	1,057,555,322.00	19.32%
4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20,097,450	14,490,000	10,430,000.00	71.98%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	20,097,450	14,490,000	10,430,000.00	71.98%
5	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	144,000,000	72,000,000	17,500,000.00	24.31%
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	144,000,000	72,000,000	17,500,000.00	24.31%

Jika melihat tabel Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 1 beberapa sub kegiatan belum ada realisasi yaitu :

- Pembangunan Gedung Terminal di targetkan Rp. 574,700,477, anggaran ini merupakan anggaran Perencanaan Pembangunan Terminal Malili dan rencana uang muka, namun pada Triwulan II belum terealisasi karena masih dalam tahap pemilihan penyedia sementara anggaran yang terealisasi merupakan pembayaran utang tahun sebelumnya.
- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar 19,32% dari target triwulan 2 karena yang terealisasi merupakan belanja rutin seperti penyediaan BBM Bus Sekolah, Pemeliharaan Bus Sekolah dan Gaji Sopir. Sementara untuk

anggaran yang besar yaitu pengadaan bus sekolah belum dilaksanakan karena masih dalam tahap penyusunan spesifikasi kebutuhan.

H. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Rasio konektivitas Kabupaten, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

a. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Kegiatan pengelolaan terminal dilakukan melalui Pemeliharaan Terminal yang ada dan Pembangunan Terminal Malili dan Terminal Tarengge, Dengan terbangunnya beberapa fasilitas utama di Terminal Malili dan Tarengge maka diharapkan aktivitas mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan dapat berjalan maksimal, sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas terminal dan tidak ada lagi aktivitas manikkan dan menurunkan penumpang dan barang yang dilakukan di luar Terminal. Sehingga jumlah orang atau masyarakat yang menggunakan fasilitas Terminal semakin meningkat setiap tahunnya.

Gambar 3.1
Pembangunan
Terminal Malili
Tahun 2024



b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan dan pengelolaan tempat Parkir untuk memenuhi kebutuhan pemilik kendaraan untuk mengurangi parkir liar.

c. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah siswa siswi yang terangkut pertahunnya, selama triwulan 2 tahun 2025 sebanyak 195.910 siswa dan siswi SMP dan SMA

Kabupaten Luwu Timur diangkut oleh Bus Sekolah setiap hari. Demi keamanan dan kenyamanan penumpang angkutan sekolah maka dilakukan pemeliharaan rutin terhadap 28 unit bus sekolah melalui Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

bertujuan untuk mengupayakan tersedianya pelayanan jasa angkutan orang dengan penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak terjadwal berupa trayek.

Kendala yang dihadapi adalah kurangnya pengurusan izin trayek, hal ini karena di Kabupaten Luwu Timur masih kurang Angkutan Pedesaan sementara jumlah penduduk semakin meningkat.

2. Program Pengelolaan Pelayaran

- a. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan guna menunjang aktivitas penyeberangan masyarakat yang menggunakan pelabuhan.

Pada tahun 2025 jumlah penumpang dan barang yang melalui Dermaga meningkat karena pada lintasan dermaga Sorowako ke dermaga Nuha dan lintasan dermaga Timampu ke dermaga Tokalimbo dilayani kapal ferry KMP Opudi dan KMP Pangkilang yang memiliki standar keselamatan dan kelaiklautan kapal, memiliki jadwal yang tetap, pelayanan yang prima serta menjamin keselamatan dan kenyamanan pelayaran. Hal inilah yang menarik minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi danau Matano dan danau Towuti yang menyebabkan meningkatnya penumpang pada penyeberangan danau Matano dan danau Towuti

II. Sasaran 2 : Meningkatnya keselamatan dan Keamanan Transportasi

Indikator 1 : Persentase angkutan umum yang laik beroperasi

Persentase angkutan umum yang laik beroperasi dengan pencapaian target triwulan 2 tahun 2025 realisasi sebesar 8,53% dihitung sesuai dengan jumlah angkutan umum yang memiliki izin laik operasi.

Formulasi perhitungan capaian target indikator 1 :

$$\begin{aligned} &= ((\text{Jumlah angkutan umum yang memiliki izin laik operasi}) / (\text{Jumlah} \\ &\quad \text{angkutan umum yang seharusnya memiliki izin laik beroperasi})) \times \\ &\quad 100\%) \\ &= ((366/4293) \times 100\%) \\ &= 8,53\% \end{aligned}$$

Indikator 1 mengukur keselamatan dan keamanan dari ketersediaan angkutan umum orang dan barang yang laik beroperasi, meningkatkan keselamatan transportasi angkutan di darat, laut dan danau. Dimana keselamatan dalam bertransportasi dapat terwujud apabila sistemnya (orang, kendaraan dan aturan) dapat menciptakan ketertiban, keamanan dan kenyamanan di kendaraan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dilakukan langkah – langkah melalui pengujian kendaraan bermotor untuk kendaraan wajib uji dan memfasilitasi pengurusan pas kapal laut dan danau sehingga kapal yang beroperasi memiliki izin operasi

Untuk mewujudkan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang aman dan selamat ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kendaraan bermotor yang digunakan harus laik jalan. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga sebelum kendaraan dioperasikan di jalan harus mendapat kepastian bahwa kendaraan tersebut telah memenuhi persyaratan dimaksud. Agar dapat diciptakan kondisi pemenuhan terhadap persyaratan di atas, maka dilakukanlah apa yang dinamakan pengujian kendaraan bermotor. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ini dimaksudkan untuk mengecek apakah kendaraan angkutan penumpang umum dan angkutan barang yang akan dioperasikan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan atau tidak. Kegiatan pengujian kendaraan bermotor dilakukan secara periodik per-setiap 6 (enam) bulan sekali.

Sedangkan untuk mewujudkan lalu lintas kapal di laut dan di danau yang aman, maka dilaksanakan kegiatan peningkatan skill pengemudi kapal dan fasilitasi perijinan kapal

Pada triwulan 2 tahun 2025 Capaian target indikator 1 hanya mencapai 8,53% karena belum dapat dilakukan aktifitas pengujian kendaraan bermotor karena adanya surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor : AJ.502/78/5/DRJD/2024 Tanggal 20 Agustus 2024 Tentang Pembekuan Keputusan Penetapan dan Sertifikat Akreditasi UPUBKB , sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dilarang melaksanakan kegiatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan tidak dapat melaksanakan pengajuan permohonan akreditasi kembali sebelum dilaksanakannya perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, sehingga untuk triwulan II dilakukan persiapan Akreditasi dan pengadaan alat uji emisi gas buang.

Adapun 96 unit kendaraan yang terdaftar laik jalan adalah kendaraan beralamat Kab. Luwu Timur yang mengurus rekomendasi melakukan pengujian di kabupaten terdekat dan terdapat 72 unit Kapal di danau yang laik berlayar serta 225 unit kapal di laut yang laik berlayar. Capaian ini didukung oleh beberapa faktor terutama perbaikan prosedur dan mekanisme pengujian, serta sistem pembinaan dan pengawasan dari instansi terkait yang berwenang dalam fungsi pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan juga mendukung dalam pencapaian target.

Tabel 3.9
Tabel Capaian Jumlah angkutan umum
yang memiliki izin laik operasi

No.	Uraian	Jumlah	Target 2025		Target TW 2		Realisasi TW 2	
			Yang berizin	%	Yang berizin	%	Yang berizin	%
1	Kendaraan Wajib Uji (Darat)	3168	3001	94,73%	1500	47,35%	69	2,18%
2	Kapal di Laut	979	400	40,86%	225	22,98%	225	22,98%
3	Kapal di Danau	146	138	94,52%	72	49,32%	72	49,32%
	TOTAL	4293	3539	82,44%	936	41,86%	196	8,53%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025

Tabel 3.10

Capaian Target Sasaran 2 Indikator 1

No.	Indikator kinerja	Sat	Target 2025	Target TW 2	Realisasi TW 1	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	%	82,44%	41,86%	8,53%	20,37%

Persentase angkutan umum yang laik beroperasi dengan pencapaian target triwulan 2 tahun 2025 sebesar 20,37% dengan realisasi sebesar 8,53%.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.10

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 Dengan Tahun 2024, dan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		Capaian Kinerja Thn 2023(%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Thn 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Thn 2025 (%)
		Target Tw2	Real		Target Tw2	Real		Target Tw2	Real	
1	2	6	7	8	9	6	8	9	10	11
1	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	19,84%	23,60%	118,95%	41,85%	44,83%	107,12%	41,86%	8,53%	20,37%

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Persentase angkutan umum yang laik beroperasi Triwulan 2 Tahun 2025 Dengan Tahun 2024, dan Tahun 2023 menggambarkan bahwa setiap tahunnya target meningkat, pada tahun 2023 capaian kinerja sebesar 118,95%, pada tahun 2024 capaian triwulan 2 sebesar 107,12% dan pada tahun 2025 capaian triwulan 2 20,96% karena jumlah kendaraan yang lulus uji banya berjumlah 96 unit, karena belum adanya aktifitas pengujian kendaraan bermotor.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.11

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 Dengan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024		Capaian Kinerja Thn 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Thn 2025(%)
		Target	Real		Target	Real	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	41,85%	44,83%	107,12%	41,86%	8,53%	20,37%

Untuk capaian kinerja tahun 2024 sebesar 107,12% dan Tahun 2025 sebesar 20,37%, ini berarti ada penurunan capaian dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar 86,75%.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 Dengan target Jangka Menengah

Tabel 3.12

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Sat	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Target Sampai Tw 2 2025	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	%	83.32%	8,53%	10,24%

Perbandingan realisasi Triwulan 2 Tahun 2025 dengan Target jangka menengah Tahun 2021-2026 adalah sebesar 10,24% walaupun capaian kinerja masih jauh namun Dinas Perhubungan tetap optimis dapat mencapai target tersebut karena pada Triwulan II telah dilakukan persiapan Akreditasi dan pengadaan alat uji sehingga Pengujian Kendaraan Bermotor dapat dilakukan kembali.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja

Penyebab keberhasilan capaian Angkutan umum yang laik beroperasi adalah :

- **Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**
Pemeliharaan terhadap 11 unit alat pengujian untuk mengkalibrasi menguji keakurasian alat yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat dan juga dilakukan penggantian suku cadang pada alat yang sudah tidak dapat beroperasi dengan baik. Alat pengujian yang akurat dapat memastikan kendaraan yang diuji KIR telah aman, nyaman dan laik jalan.
- **Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**
Untuk mendapatkan atau memberikan kondisi lalu lintas yang selancar dan seaman mungkin bagi pergerakan manusia, barang dan jasa dengan kondisi geometrik/jaringan dan lalu lintas yang ada melalui system pengaturan, penataan dan regulasi maka dengan rutin dilaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan hasilnya adalah rekomendasi yang perlu dilakukan pada ruas jalan tertentu sesuai dengan hasil rekayasa.
- **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota**
Berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor PM 13 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal, maka setiap pemilik kapal wajib mendaftarkan dan mengukurkan kapalnya di kantor Syahbandar terdekat. Untuk membantu masyarakat pemilik kapal yang kurang aktif dalam pengurusan perijinan, maka Dinas Perhubungan memfasilitasi pengurusan dokumen pas kecil, dengan cara menjemput bola ke rumah pemilik kapal sesuai dengan data yang telah dimutakhirkan.
- **Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**
Peningkatan keselamatan untuk transportasi danau diupayakan dengan memfasilitasi pengurusan sertifikat kapal agar kapal tersebut laik berlayar, pada tahun 2025 kapal yang laik berlayar di danau sebanyak 36 unit, selain itu dilakukan Pengawasan terhadap pengoperasian pelabuhan di Danau Towuti dan Danau Matano

yang dilakukan secara rutin. Pada tahun ini juga telah dilakukan kolaborasi dengan pihak BPTD dan Kementerian perhubungan untuk melakukan pengukuran dan pendaftaran kapal yang masih sementara dalam pengurusan kelengkapan dokumen persyaratan oleh pihak pemilik kapal

2. Analisis Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja

Penyebab kegagalan capaian indikator 1 yaitu :

- Kurangnya Sumber Daya manusia khususnya tenaga penguji kendaraan bermotor, kondisi saat ini hanya terdapat 1 orang yang bersertifikat sesuai dengan jenjangnya, jika dibandingkan dengan jumlah pengujian yang dilakukan setiap harinya, maka dapat menjadi salah satu faktor penghambat pencapaian target kinerja. sehingga diharapkan adanya penambahan personel Penguji Kendaraan Bermotor
- Pengujian Kendaraan Bermotor yang belum dapat dilaksanakan sehingga mempengaruhi capaian kinerja
- Angkutan umum yang tidak tertib dalam mengurus dan memperpanjang bukti lulus uji
- Adanya keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Kantor Syahbandar sehingga tidak dapat melakukan pengukuran kapal terhadap kapal yang telah difasilitasi pengurusan ijinnya
- Pemilik kapal yang kurang aktif dan cenderung malas melakukan pengurusan surat izin berlayar

3. Alternative Solusi Yang Harus Dilakukan

Alternative solusi untuk permasalahan pada Sasaran 1 dengan yaitu :

- Bekerjasama dengan Polres Luwu Timur melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum yang tidak memperpanjang izin bukti lulus uji
- Mengajukan ke BKPSDM Kabupaten Luwu Timur untuk membuka formasi penerimaan CPNS atau PPPK untuk Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor.
- Aparatur Dinas Perhubungan telah melakukan kerjasama dengan pihak BPTD dan Kementerian perhubungan untuk melakukan pengukuran dan pendaftaran kapal yang masih sementara dalam pengurusan kelengkapan dokumen persyaratan oleh pihak pemilik kapal.

- Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait agar seluruh permohonan pengurusan pas kecil dapat ditindaklanjuti

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut alokasi anggaran serta anggaran yang mendukung capaian kinerja Persentase angkutan umum yang laik beroperasi

Tabel 3.14

Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 2 Indikator 1

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN II (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 31 JUNI 2025	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9,812,580,989	3,405,666,989	1,586,214,680.50	46.58%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5,766,820,989	850,370,989	29,370,988.50	3.45%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4,045,760,000	2,555,296,000	1,556,843,692.00	60.93%
2	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	363,000,000	329,273,000	25,730,000.00	7.81%
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	140,000,000	112,273,000	25,730,000.00	22.92%
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	223,000,000	217,000,000		0.00%
3	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	320,304,500	224,308,500	155,945,487.00	69.52%
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	310,413,500	215,537,500	155,945,487.00	72.35%
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	9,891,000	8,771,000	-	0.00%
4	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	157,036,500	88,517,175	22,784,876.00	25.74%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	157,036,500	88,517,175	22,784,876.00	25.74%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN II (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 31 JUNI 2025	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	316,772,000	163,439,875	85,789,000.00	52.49%
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	316,772,000	163,439,875	85,789,000.00	52.49%

Jika melihat tabel Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 2 indikator 1 maka terlihat masih ada sub kegiatan yang belum terealisasi pada triwulan 2 yaitu :

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor belum terealisasi karena belum dilakukan pemeliharaan terhadap Alat Uji Kendaraan Bermotor, dan rencana akan dilakukan pada Triwulan III hal ini karena salah satu rangkaian pemeliharaan adalah Kalibrasi alat uji yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sehingga jadwal kalibrasi harus menyesuaikan dengan jadwal dari Kementerian Perhubungan
2. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota telah dilaksanakan kegiatan pertemuan Forum Lalu Lintas Kabupaten Luwu Timur, namun belum di GU kan.

G. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Persentase angkutan umum yang laik beroperasi, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- a. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Angkutan umum yang aman dan nyaman dan laik jalan adalah angkutan umum yang melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala melalui rekomendasi terhadap kendaraan Kab. Luwu Timur yang akan melaksanakan uji kendaraan di kabupaten lain.
- b. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Untuk mendapatkan atau memberikan kondisi lalu lintas yang selancar dan seaman mungkin bagi pergerakan manusia, barang dan jasa dengan kondisi geometrik/jaringan dan lalu lintas yang ada

melalui system pengaturan, penataan dan regulasi maka dengan rutin dilaksanakan manajemen dan rekaya lalu lintas dengan hasilnya adalah rekomendasi yang perlu dilakukan pada ruas jalan tertentu sesuai dengan hasil rekayasa.

2. Program Pengelolaan Pelayaran

- a. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor PM 39 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal, maka setiap pemilik kapal wajib mendaftarkan dan mengukur kapal di kantor Syahbandar terdekat. Untuk membantu masyarakat pemilik kapal yang kurang aktif dalam pengurusan perijinan, maka Dinas Perhubungan memfasilitasi pengurusan dokumen pas kecil, dengan cara menjemput bola ke rumah pemilik kapal sesuai dengan data yang telah dimutakhirkan.
- b. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan guna menunjang aktivitas penyeberangan masyarakat yang menggunakan pelabuhan.
Peningkatan keselamatan untuk transportasi danau diupayakan dengan memfasilitasi pengurusan sertifikat kapal agar kapal tersebut laik berlayar, pada triwulan 2 tahun 2025 kapal yang laik berlayar di danau sebanyak 72 unit, selain itu dilakukan Pengawasan terhadap pengoperasian pelabuhan di Danau Towuti dan Danau Matano yang dilakukan secara rutin. Pada tahun ini juga telah dilakukan kerjasama dengan pihak BPTD dan Kementerian perhubungan untuk melakukan pengukuran dan pendaftaran kapal yang masih sementara dalam pengurusan kelengkapan dokumen persyaratan oleh pihak pemilik kapal

Gambar 3.2
Pengawasan
Aktivitas
Pelabuhan



Sasaran 2 : Meningkatnya keselamatan dan Keamanan Transportasi
Indikator 2 : Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi

Rasio kejadian kecelakaan transportasi untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi adalah Perbandingan kejadian kecelakaan angkutan tidak laik jalan dengan jumlah kecelakaan angkutan wajib uji.

Formulasi perhitungan capaian target indikator 2 :

$$= \frac{\text{Jumlah kejadian kecelakaan angkutan tidak laik jalan tahun } n}{\text{jumlah kejadian angkutan wajib uji tahun } n}$$

$$= \frac{(0/4) \times 100\%}{1}$$

$$= 0,068$$

Indikator 2 mengukur keselamatan dan keamanan dari Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi angkutan wajib uji. Semakin rendah Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi maka makin sedikit kendaraan wajib uji yang kecelakaan karena kendaraan tersebut tidak laik jalan.

Tabel 3.15

Tabel Jumlah Kejadian Kecelakaan Triwulan 2 Tahun 2025

No	Uraian	2025
1	Jumlah Kecelakaan	44
2	Jumlah Kecelakaan Angkutan Umum	3
3	Jumlah Kecelakaan Angkutan Umum Barang	3
4	Jumlah Kecelakaan Karena Kondisi Rusak	0
5	Jumlah Kecelakaan Karena Karena Rambu-Rambu Lalu Lintas	0
6	Jumlah Kecelakaan Karena Kondisi Kendaraan	0

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025

Tabel 3.16

Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 1 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Target Tw 1	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4		5	6
1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	Rasio	0,20	0,20	0,068	166%

Persentase angkutan umum yang laik beroperasi dengan pencapaian target triwulan 2 tahun 2025 sebesar 166% dengan realisasi sebesar 0,68 dari target 0,20. Target Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi adalah target menurun jadi semakin kecil realisasi semakin baik.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.17

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 1 Triwulan 2 Tahun 2025 Dengan Tahun 2024, dan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		Capaian Kinerja Thn 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Thn 2023 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Thn 2025 (%)
		Target TW 2	Real		Target TW 2	Real		Target TW 2	Real	
1	2	6	7	8	9	6	8	9	10	11
1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	0,33	0	100%	0,27	0	100%	0,20	0,068	166%

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian tahun 2023 dan 2024 adalah 200% hal ini karena tidak ada kendaraan wajib uji yang mengalami kecelakaan yang disebabkan kendaraan tersebut tidak laik jalan tetapi karena faktor manusia atau pengemudinya serta faktor lingkungan atau cuaca. Pada tahun 2025 terdapat realisasi sebesar 0,68 yang berarti terdapat kecelakaan angkutan umum dan barang

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.18

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 Dengan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024		Capaian Kinerja Thn 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Thn 2025 (%)
		Target TW 2	Real		Target	Real	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	0,27	0	100%	0,20	0,068	166%

Untuk capaian kinerja tahun 2025 capaian sebesar 166% dan tahun 2024 sebesar 200%

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 Dengan target Jangka Menengah

Tabel 3.19

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Sasaran 1 Triwulan 2 Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Sat	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Target Sampai 2025	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	%	0,13	0,068	147,69%

Perbandingan realisasi Tahun 2025 dengan Target jangka menengah Tahun 2021-2026 adalah sebesar 147,69% jika melihat trend yang ada maka Dinas Perhubungan optimis realisasi tersebut akan tetap bertahan sampai akhir renstra.

E. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Tabel 3.20

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Kinerja Serta Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja Utama	Sat	Realisasi Target Nasional 2025	Realisasi Target Kabupaten	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Dalam 1 Juta Keberangkatan	Rasio	16,24	0,000044	199,99%

Untuk target Nasional tentang Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kementerian Perhubungan menetapkan target Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Dalam 1 Juta Keberangkatan, sehingga jika dibandingkan dengan target Kabupaten Luwu Timur maka perhitungannya adalah membandingkan Jumlah Kecelakaan Transportasi angkutan wajib uji dibagi 1.000.000 keberangkatan

Rumus Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Dalam 1 Juta Keberangkatan
= Jumlah Kejadian Kecelakaan/1.000.000 keberangkatan
= 44/1.000.000
= 0,000044

Bila dilihat perbandingannya maka Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Dalam 1 Juta Keberangkatan di Kabupaten Luwu Timur lebih kecil karena dalam lingkup yang kecil.

F. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.21

Capaian Realisasi Sasaran 2 Target 2

No	Indikator Kinerja Utama Sasaran 1	Capaian %
1	2	6
1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	166%

1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja

Penyebab keberhasilan capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi adalah :

- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan secara rutin dilakukan pemeliharaan penerangan jalan umum, pemeliharaan rambu lalu lintas atau perlengkapan jalan berupa pemeliharaan terhadap traffic light dan warning light, pemeliharaan papan nama jalan yang ada di Kabupaten Luwu Timur untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemeliharaan terhadap 21 unit halte bus sekolah juga dilakukan secara rutin.
- Membangun Koordinasi dan Komunikasi dengan instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
Agar terjadi keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Analisis Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja

Penyebab kegagalan capaian indikator 1 yaitu :

- Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang masih dalam tahap perencanaan, belum ada realisasi fisik
- Angkutan umum yang tidak tertib berlalu lintas
- Belum optimalnya Koordinasi dan Komunikasi stake holder terkait dalam menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan

3. Alternative Solusi Yang Harus Dilakukan

Alternative solusi untuk permasalahan pada Sasaran 1 dengan yaitu :

- Bekerjasama dengan Polres Luwu Timur melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum yang tidak memperpanjang izin bukti lulus uji
- Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait melalui Forum Lalu Lintas dan angkutan Jalan

L. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut alokasi anggaran serta anggaran yang mendukung kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi

Tabel 3.22

Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 2 Indikator 2

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN II (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 31 JUNI 2025	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9,812,580,989	3,405,666,989	1,586,214,680.50	46.58%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5,766,820,989	850,370,989	29,370,988.50	3.45%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4,045,760,000	2,555,296,000	1,556,843,692.00	60.93%
2	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	363,000,000	329,273,000	25,730,000.00	7.81%
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	140,000,000	112,273,000	25,730,000.00	22.92%
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	223,000,000	217,000,000		0.00%
3	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	320,304,500	224,308,500	155,945,487.00	69.52%
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	310,413,500	215,537,500	155,945,487.00	72.35%
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	9,891,000	8,771,000	-	0.00%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN II (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 31 JUNI 2025	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	157,036,500	88,517,175	22,784,876.00	25.74%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	157,036,500	88,517,175	22,784,876.00	25.74%
5	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	316,772,000	163,439,875	85,789,000.00	52.49%
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	316,772,000	163,439,875	85,789,000.00	52.49%

Jika melihat tabel Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 2 indikator 2 maka terlihat rata-rata capaian realisasi Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota belum ada realisasi karena pada triwulan 2 masih pada tahap pemilihan penyedia

M. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Rasio konektivitas Kabupaten, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

a. Kegiatan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini meliputi pemasangan perlengkapan jalan dan pemeliharaan perlengkapan jalan berupa penerangan jalan umum warning light, traffic light dan halte bus sekolah dengan capaian

100% dimana perlengkapan jalan yang disediakan berfungsi dengan baik, uraian sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang meliputi Pemasangan Penerangan Jalan Umum dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan namun masih dalam tahap pemilihan penyedia
- b) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan secara rutin dilakukan pemeliharaan penerangan jalan umum, pemeliharaan rambu lalu lintas atau perlengkapan jalan berupa pemeliharaan terhadap traffic light dan warning light, pemeliharaan papan nama jalan yang ada di Kabupaten Luwu Timur untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemeliharaan terhadap 21 unit halte bus sekolah juga dilakukan secara rutin

III.Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas dan pencaipan kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Perhubungan

Indikator : Nilai SAKIP Dinas Perhubungan

Indikator Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan pada tahun n.

Penilaian Evaluasi SAKIP SKPD merupakan penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan yang dievaluasi setiap tahunnya. Penilaian akuntabilitas kinerja SKPD dinilai oleh Inspektorat dan dilaporkan dalam bentuk hasil penilaian atas kinerja organisasi dan kinerja keuangan organisasi. Bentuk akhir dari SAKIP adalah dalam bentuk laporan kinerja yaitu LAKIP

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 3 bahwa capaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi di Dinas Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 berdasarkan Nilai SAKIP dapat dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.23

Capaian Kinerja Sasaran 3 Indikator 1 Triwulan 2 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Target TW 2	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4		5	6
1	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Nilai	79,85	79,85	81,50	102,07%

Realisasi SAKIP tahun 2025 merupakan hasil penilaian dari SAKIP Tahun 2024 dengan realisasi 81,50.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.27

Capaian Realisasi Sasaran 3

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian %
1	2	3
1	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	102,07%

1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja

Walaupun belum ada penilaian nilai SAKIP Dinas Perhubungan namun tetap diambil langkah – langkah untuk mencapai peningkatan nilai SAKIP sebagai berikut:

- Adanya rapat – rapat evaluasi yang dilakukan dalam rangka monitoring capaian – capaian kinerja yang dilakukan
- Adanya upaya percepatan capaian kinerja agar dapat terlaksana dengan baik
- Perencanaan yang matang didalam menyusun suatu program / kegiatan yang terkait dengan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan.
- Penetapan indikator kinerja yang tepat, terukur dan dapat dicapai.
- Pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan, terutama yang rutin dilaksanakan setiap tahun.

- Adanya Koordinasi yang intens baik internal di Dinas Perhubungan maupun eksternal dengan OPD Mitra (Inspektorat, Bapelitbangda, Bagian Organisasi)

2. *Analisis Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja*

Penyebab kegagalan capaian indikator sasaran 3 yaitu :

- Untuk realisasi tahun 2025 akan menyesuaikan dengan hasil rekomendasi hasil penilaian SAKIP Tahun 2024

3. *Alternative Solusi Yang Harus Dilakukan*

Alternative solusi untuk permasalahan pada Sasaran 3 dengan yaitu :

- Meningkatkan Pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan, terutama yang rutin dilaksanakan setiap tahun

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut alokasi anggaran serta anggaran perubahan dari sub kegiatan terkait Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Tabel 3.28

Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 3

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 30 JUNI 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,323,160,014	2,020,309,227.00	46.73%	2,302,850,787	53.27%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68,015,300	22,304,926.00	32.79%	45,710,374	67.21%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34,108,150	5,103,520.00	14.96%	29,004,630	85.04%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,485,650	1,171,634.00	47.14%	1,314,016	52.86%
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,784,450	709,942.00	25.50%	2,074,508	74.50%
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28,637,050	15,319,830.00	53.50%	13,317,220	46.50%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,501,830,394	1,760,375,950.00	50.27%	1,741,454,444	49.73%
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,448,223,444	1,747,480,755.00	50.68%	1,700,742,689	49.32%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	53,606,950	12,895,195.00	24.06%	40,711,755	75.94%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 30 JUNI 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21,632,750	7,500,000.00	34.67%	14,132,750	65.33%
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21,632,750	7,500,000.00	34.67%	14,132,750	65.33%
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	11,657,000	4,011,289.00	34.41%	7,645,711	65.59%
8	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	11,657,000	4,011,289.00	34.41%	7,645,711	65.59%
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70,023,050	1,882,100.00	2.69%	68,140,950	97.31%
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24,903,050	-	0.00%	24,903,050	100.00%
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45,120,000	1,882,100.00	4.17%	43,237,900	95.83%
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	196,311,562	125,776,463.00	64.07%	70,535,099	35.93%
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,542,000	-	0.00%	5,542,000	100.00%
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,946,262	-	0.00%	3,946,262	100.00%
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46,970,800	19,006,125.00	40.46%	27,964,675	59.54%
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,959,700	5,370,000.00	29.90%	12,589,700	70.10%
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,220,000	3,850,000.00	46.84%	4,370,000	53.16%
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,355,000	3,890,000.00	41.58%	5,465,000	58.42%
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104,317,800	93,660,338.00	89.78%	10,657,462	10.22%
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	114,556,750	-	0.00%	114,556,750	100.00%
18	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan	31,200,000	-	0.00%	31,200,000	100.00%
19	Pengadaan Mebel	14,000,000	-	0.00%	14,000,000	100.00%
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69,356,750	-	0.00%	69,356,750	100.00%
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162,363,208	46,141,792.00	28.42%	116,221,416	71.58%
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,577,950	750,000.00	3.64%	19,827,950	96.36%
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73,985,258	30,391,792.00	41.08%	43,593,466	58.92%
23	Penyediaan Jasa Pelayanan	67,800,000	-	22.12%	52,800,000	77.88%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 30 JUNI 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Umum Kantor		15,000,000.00			
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176,770,000	52,316,707.00	29.60%	124,453,293	70.40%
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24,920,000	8,932,200.00	35.84%	15,987,800	64.16%
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115,840,000	31,972,007.00	27.60%	83,867,993	72.40%
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,010,000	-	0.00%	16,010,000	100.00%
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,000,000	11,412,500.00	57.06%	8,587,500	42.94%

Jika melihat tabel Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 3 indikator 1 maka terlihat rata-rata beberapa sub kegiatan belum maksimal dalam realisasi keuangan

D. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, yaitu dengan adanya kegiatan rapat – rapat evaluasi yang dilakukan dalam rangka monitoring capaian – capaian kinerja yang dilakukan, serta tindak lanjut yang dilakukan atas permasalahan yang ada.

A. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.13

Realisasi Anggaran Triwulan 2 Tahun 2025 Dinas Perhubungan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 30 JUNI 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Urusan Perhubungan	28,379,296,186	5,251,802,625.030	18.51%	23,127,493,560.97	81.49%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,323,160,014	2,020,309,227.00	46.73%	2,302,850,787	53.27%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68,015,300	22,304,926.00	32.79%	45,710,374	67.21%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34,108,150	5,103,520.00	14.96%	29,004,630	85.04%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,485,650	1,171,634.00	47.14%	1,314,016	52.86%
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,784,450	709,942.00	25.50%	2,074,508	74.50%
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28,637,050	15,319,830.00	53.50%	13,317,220	46.50%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,501,830,394	1,760,375,950.00	50.27%	1,741,454,444	49.73%
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,448,223,444	1,747,480,755.00	50.68%	1,700,742,689	49.32%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	53,606,950	12,895,195.00	24.06%	40,711,755	75.94%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 30 JUNI 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21,632,750	7,500,000.00	34.67%	14,132,750	65.33%
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21,632,750	7,500,000.00	34.67%	14,132,750	65.33%
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	11,657,000	4,011,289.00	34.41%	7,645,711	65.59%
8	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	11,657,000	4,011,289.00	34.41%	7,645,711	65.59%
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70,023,050	1,882,100.00	2.69%	68,140,950	97.31%
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24,903,050	-	0.00%	24,903,050	100.00%
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45,120,000	1,882,100.00	4.17%	43,237,900	95.83%
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	196,311,562	125,776,463.00	64.07%	70,535,099	35.93%
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,542,000	-	0.00%	5,542,000	100.00%
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,946,262	-	0.00%	3,946,262	100.00%
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46,970,800	19,006,125.00	40.46%	27,964,675	59.54%
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,959,700	5,370,000.00	29.90%	12,589,700	70.10%
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,220,000	3,850,000.00	46.84%	4,370,000	53.16%
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,355,000	3,890,000.00	41.58%	5,465,000	58.42%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 30 JUNI 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104,317,800	93,660,338.00	89.78%	10,657,462	10.22%
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	114,556,750	-	0.00%	114,556,750	100.00%
18	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan	31,200,000	-	0.00%	31,200,000	100.00%
19	Pengadaan Mebel	14,000,000		0.00%	14,000,000	100.00%
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69,356,750	-	0.00%	69,356,750	100.00%
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162,363,208	46,141,792.00	28.42%	116,221,416	71.58%
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,577,950	750,000.00	3.64%	19,827,950	96.36%
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73,985,258	30,391,792.00	41.08%	43,593,466	58.92%
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67,800,000	15,000,000.00	22.12%	52,800,000	77.88%
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176,770,000	52,316,707.00	29.60%	124,453,293	70.40%
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24,920,000	8,932,200.00	35.84%	15,987,800	64.16%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 30 JUNI 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115,840,000	31,972,007.00	27.60%	83,867,993	72.40%
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,010,000	-	0.00%	16,010,000	100.00%
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,000,000	11,412,500.00	57.06%	8,587,500	42.94%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	23,438,327,672	3,105,419,522	13.25%	20,332,908,150	86.75%
10	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9,812,580,989	1,586,214,681	16.17%	8,226,366,309	83.83%
28	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5,766,820,989	29,370,988.50	0.51%	5,737,450,001	99.49%
29	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4,045,760,000	1,556,843,692.00	38.48%	2,488,916,308	61.52%
11	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	6,150,174,033	265,624,032.53	4.32%	5,884,550,000	95.68%
30	Pembangunan Gedung Terminal	5,423,120,477	44,700,477.00	0.82%	5,378,420,000	99.18%
31	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	727,053,556	220,923,555.53	30.39%	506,130,000	69.61%
12	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	10,009,200	3,920,000.00	39.16%	6,089,200	60.84%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 30 JUNI 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	10,009,200	3,920,000.00	39.16%	6,089,200	60.84%
13	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	363,000,000	25,730,000	7.09%	337,270,000	92.91%
33	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	140,000,000	25,730,000.00	18.38%	114,270,000	81.62%
34	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	223,000,000		0.00%	223,000,000	100.00%
14	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	320,304,500	155,945,487.00	48.69%	164,359,013	51.31%
35	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	310,413,500	155,945,487.00	50.24%	154,468,013	49.76%
36	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	9,891,000	-	0.00%	9,891,000	100.00%
15	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6,762,161,500	1,057,555,322.00	15.64%	5,704,606,178	84.36%
37	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6,762,161,500	1,057,555,322.00	15.64%	5,704,606,178	84.36%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 30 JUNI 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20,097,450	10,430,000.00	51.90%	9,667,450	48.10%
38	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	20,097,450	10,430,000.00	51.90%	9,667,450	48.10%
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	617,808,500	126,073,876	20.41%	491,734,624	79.59%
17	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	157,036,500	22,784,876			
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	157,036,500	22,784,876.00	14.51%	134,251,624	85.49%
18	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	460,772,000	103,289,000.00			
40	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	144,000,000	17,500,000.00	12.15%	126,500,000	87.85%
41	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	316,772,000	85,789,000.00	27.08%	230,983,000	72.92%

BAB 4

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur selama triwulan 2 tahun 2025. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan di masa-masa mendatang.

Dengan selesainya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Triwulan 2 Tahun 2025, yang disusun dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan Penetapan Kinerja sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun. Secara umum kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Triwulan 2 Tahun 2025 dapat dikategorikan sangat Baik dengan nilai rata – rata capaian indikator kinerja sasaran yaitu 97,26%.

Berdasarkan uraian dan analisis kinerja dari belanja langsung sebagaimana diungkapkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa capaian Kinerja Dinas Perhubungan telah terealisasi akuntabilitas keuangan mencapai 18,51%, namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan - penyempurnaan Kinerja Dinas Perhubungan, khususnya Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.

Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan adalah:

1. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan senantiasa mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
2. (RPJMD) / Renstra yang telah disusun dan disepakati bersama.
3. Meningkatkan responsibilitas aparatur terhadap segala permasalahan yang timbul, sehingga ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan

pemerintahan dapat ditekan/ menurun.


4. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi di tingkat manajerial, guna pencapaian kinerja yang lebih baik.
5. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk menunjang pencapaian target kinerja dinas secara maksimal.

2. SARAN

Walaupun demikian dalam pelaksanaan masih banyak kendala yang dihadapi sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dan pengembangan pembangunan diperlukan adanya peran serta dari pihak terkait, baik instansi pemerintah, maupun badan usaha yang terlibat dalam bidang perhubungan. Dengan adanya dukungan dan kesungguhan dari semua pihak untuk melaksanakan perencanaan yang lebih baik di masa yang akan datang sesuai dengan program – program Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 14 Juli 2025

KEPALA DINAS,


A. F. SALIM, S.Sos, MM
NIP. 196511051987031015

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Soekarno – Hatta, Malili 92981 Telepon/Faks: (0474) 321429

Email : dishubluwutimurkab.go.id

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Perhubungan

No.	Catatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Triwulan I	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak lanjut	PJ	Status/ Progres Penyelesaian
1.	Pohon Kinerja belum dilengkapi crosscutting dan penjelasannya	Lengkapi Pohon Kinerja dengan crosscutting dan penjelasannya	Pohon kinerja telah dilengkapi dengan crosscutting dan penjelasannya	Sekretaris (Kasubag Perencanaan)	selesai
2	Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum sepenuhnya tercapai dengan baik		Target yang ditetapkan pada Triwulan I belum sepenuhnya tercapai, sehingga untuk selanjutnya akan dilakukan Upaya peningkatan pencapaian kinerja	Kepala Bidang Lingkup Dinas Perhubungan	selesai
3	Belum sepenuhnya setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan (SKP)		Kepedulian setiap pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan (SKP) akan ditingkatkan dengan cara masing-masing pegawai menginput SKP	ASN DISHUB	selesai
4	Belum seluruhnya pegawai pada Dinas Perhubungan memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja		Pegawai Dinas Perhubungan akan dilibatkan dalam	ASN DISHUB	selesai

No.	Catatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Triwulan I	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak lanjut	PJ	Status/ Progres Penyelesaian
5	Pengumpulan data kinerja dan pengumpulan capaian kinerja belum menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)		Pengumpulan data kinerja dan pengumpulan capaian kinerja belum menggunakan teknologi informasi (Aplikasi) namun Dinas Perhubungan memaksimalkan APLIKASI yang disediakan Bappelitbangda yaitu SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Sekretaris (Kasubag Perencanaan)	selesai
6	Dokumen laporan kinerja belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)	menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) pada laporan kinerja	Pada Laporan Kinerja TW 2 akan menginfokan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)	Sekretaris (Kasubag Perencanaan)	selesai
7	Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian setiap pegawai (SKP)	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai (SKP)	Kepedulian setiap pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan (SKP) akan ditingkatkan dengan cara masing-masing pegawai menginput SKP	ASN DISHUB	selesai
8	Evaluasi kineija telah dilaksanakan secara berkala namun belum menggunakan aplikasi		Evaluasi kineija telah dilaksanakan secara berkala namun belum menggunakan aplikasi namun Dinas Perhubungan memaksimalkan APLIKASI yang disediakan Bappelitbangda yaitu SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Sekretaris (Kasubag Perencanaan)	selesai

No.	Catatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Triwulan I	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak lanjut	PJ	Status/ Progres Penyelesaian
9	Semua rekomendasi hasil evaluasi triwulan sebelumnya telah ditindaklanjuti namun tidak dituangkan dalam laporan kinerja		rekomendasi hasil evaluasi triwulan sebelumnya akan dituangkan dalam laporan kinerja	Sekretaris (Kasubag Perencanaan)	selesai

Malili, 25 Agustus 2025

KEPALA DINAS,



A.R. SALIM, S.Sos, MM


NIP. 196511051987031015

1. Lengkapi Pohon Kinerja dengan croscutting dan penjelasannya

PENJELASAN CROSCUTTING

DINAS PERHUBUNGAN

No	Sub Kegiatan		OPD/Instansi yang Berakbitan	Ket
	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)		
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Bus Sekolah, Pemeliharaan serta penyediaan operasional Bus sekolah untuk mengangkut anak sekolah sebagai wujud dukungan terhadap peningkatan angka partisipasi Sekolah
2	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dinas PU	Dishub menyediakan Pereengkapan jalan untuk meningkatkan keselamatan jalan dan menyediakan pergerakan yang teratur terhadap pengguna jalan
3	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	POLRES	Bekerjasama dengan Polisi untuk melaksanakan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	POLRES	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan KabupatenBekerjasama dengan Polisi untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan Izin
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kantor Syahbandar	Dishub melakukan fasilitasi nelayan dalam memenuhi persyaratan pengurusan pas kecil, kemudian diserahkan ke kantor syahbandar untuk dilakukan pengukuran dan peerbitan Pas kecil.
			Dinas Pariwisata	Dishub mendukung promosi obyek wisata yang dilakukan oleh Kab. Luwu Timur dengan menyediakan sarana dan prasarana pariwisata angkutan penumpang berupa kapal kayu menuju lokasi wisata
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Batal Pengelola Transportasi Darat	Melakukan koordinasi dengan BPTD terkait : 1. Penyediaan prasarana angkutan (pelabuhan) penyeberangan di bangun BPTD dan Pemerintah Daerah menerbitkan Izin lokasi pembangunan dan Izin operasional pelabuhan 2. Penyediaan sarana angkutan (kapal) BPTD membangun atau menyediakan kapal, Pemerintah Daerah menetapkan lintasan penyeberangan, menerbitkan izin operasional kapal, penetapan tarif dan menetapkan Standar pelayanan minimal kapal 3. Keselamatan transportasi angkutan penyeberangan, pengawasan keselamatan angkutan penyeberangan adalah kewenangan BPTD, Pemerintah Daerah mengawasi Standar pelayanan minimal (SPM) dan dan mengawasi penetapan tarif kapal


Mali, 25 Agustus 2025
KEPALA DINAS,
A.R. SALIM, S.Sos, MM
NIP. 196511051987031015

- menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) pada laporan kinerja

➤ melingkupi kendaraan plat gangang beroperasi lainnya kendaraan umum yang sah

3. **Alternative Solusi Yang Harus Dilakukan**

Alternative solusi untuk permasalahan pada Sasaran 1 dengan yaitu :

- Bekerjasama dengan Polres Luwu Timur melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum yang tidak memperpanjang izin trayeknya
- Memberikan teguran langsung kepada pemilik kendaraan yang tidak memiliki izin trayek namun melakukan aktivitas layaknya angkutan penumpang umum, sehingga hal ini merugikan angkutan penumpang umum lainnya, karena akan mempengaruhi jumlah penumpang yang diangkut serta pendapatan pemilik kendaraan.

3. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai (SKP)

Buku Panduan

MAIN MENU

Profil

SKP

Tim Kerja

Angka Kredit

Persetujuan PAK

Rekap Keberatan

DASHBOARD

Dashboard

SASARAN KINERJA PEGAWAI

Status SKP PERSETUJUAN

PERIODE : AGUSTUS

Pemerintah Kab. Luwu Timur

PERIODE PENILAIAN: 1 AGUSTUS SD 31 AGUSTUS TAHUN 2025

Jenis Pegawai Pimpinan		Model SKP JAF		Pendaftaran KUALITATIF	
NO	PEGAUAI YANG DINILAI	NO	PEJABAT PENILAI KINERJA		
1	NAMA: SRI DEWITA ELIM, ST	1	NAMA: AMIRAN AKMAL, S.STP		
2	NIP: 99080362014040001	2	NIP: 99040362003121001		
3	PANGKAT / GOL. RUANG: Penata Muda Tingkat I / III/b	3	PANGKAT / GOL. RUANG: Pembina Tingkat I / IV/b		
4	JABATAN: Kepala SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	4	JABATAN: Sekretaris DINAS		
5	UNIT KERJA: SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	5	UNIT KERJA: Sekretaris		

RENCANA AKSI

NO	RENCANA HASIL KERJA	RENCANA AKSI
1	<p>Terwujudnya pengelolaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</p> <p>Indikator:</p> <p>1. - Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu Target Tahunan :</p>	<p>Tambah</p> <p>1. Melakukan finalisasi inputan Renstra di SPD Target : 1 Laporan</p> <p>Edit Hapus</p>
2	<p>Terwujudnya pengelolaan keuangan perangkat daerah</p> <p>Indikator:</p> <p>1. - Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik Target Tahunan :</p>	<p>Tambah</p> <p>1. Melakukan rekonsiliasi Gaji ASN untuk anggaran perubahan tahun 2025 Target : 1 laporan</p> <p>2. Mengikuti Rapat dengan pendapat umum terkait daya serap APBD Pokok TA 2025 Target : 1 Kegiatan</p> <p>Edit Hapus</p>
	<p>Terwujudnya pengelolaan pendapatan perangkat daerah PD</p> <p>Indikator:</p>	<p>Tambah</p> <p>1. Melakukan finalisasi rencana kerja anggaran pendapatan tahun 2026 Target : 1 laporan</p>